

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan harus mampu melahirkan manusia-manusia yang demokratis. Kehidupan masyarakat demokratis harus didasarkan pada kesadaran warga bangsa atas ide-ide dan cita-cita demokrasi yang melahirkan kesadaran dan keyakinan bahwa hanya dalam masyarakat yang demokratislah dimungkinkan warga bangsa untuk memaksimalkan kesejahteraan dan kebebasan. Ide dan cita-cita akan demokrasi tersebut harus ditanamkan di kalangan warga muda bangsa antara lain lewat pendidikan. (Zamroni, 2013:32-33)

Berdasarkan penjelasan diatas, pendidikan demokrasi adalah suatu sistem politik yang bisa dibentuk dengan peran serta masyarakat dan pendidikan demokrasi harus mampu melahirkan manusia yang demokratis yang didasarkan pada kesadaran dan keyakinan bahwa masyarakat yang demokratislah masyarakat yang mampu menjadikan Indonesia sejahtera dan bebas mengeluarkan ide dan cita-cita di kalangan generasi penerus bangsa dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Menurut Muhaimin, (2002:11) adalah:

bahwa Indonesia yang lebih demokratis dan berkeadaban yang sanggup membawa kita meraih keunggulan atau bahkan kejayaan di millenium ketiga.

Menurut Zamroni, (2003:11) Partisipasi generasi baru dalam sistem politik yang demokratis akan terjadi apabila generasi baru memiliki kualitas dan kemampuan antara lain:

1. Memiliki identitas diri termasuk komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang lebih luas dan kemampuan berkelompok secara terorganisir dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Memiliki kesadaran bahwa kebijakan yang diputuskan dalam proses politik baik langsung ataupun tidak langsung akan mempengaruhi kehidupan mereka.
3. Memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memperoleh informasi guna memberikan pedoman dalam sosial politik.
4. Memiliki keseimbangan antara *trust* dan *skeptis* atas kehidupan politik yang ada.
5. Memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan.
6. Memiliki kapasitas, kemauan untuk bersama-sama membicarakan perbedaan dengan penuh toleransi.
7. Memiliki rasa hormat kepada individu baik dalam kelompoknya maupun yang ada di luar kelompok.
8. Memiliki kemauan untuk bekerjasama dan bernegosiasi termasuk kemauan untuk bekerja dalam suatu tim dan menyajikan secara efektif argumentasi yang dimiliki tanpa menghina pendapat pihak lain.
9. Memiliki kemampuan dan kemauan untuk mengambil peran kepemimpinan saat diperlukan.
10. Memiliki keyakinan atas kemampuannya untuk dapat berbuat kebaikan baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

Berdasarkan penjelasan diatas, untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis serta tujuan demokrasi itu sendiri harus melibatkan semua komponen baik dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara kemudian di implementasikan dalam partisipasi politik yang dinamis sesuai dengan landasan dan nilai-nilai fundamental demokrasi baik di dalam lembaga formal maupun non formal karena pendidikan sangat penting guna mendukung terciptanya demokrasi dan masyarakat madani yang berkeadaban dan berkepribadian sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang demokratis. Menurut Cipto, (2002:1)

“Cara paling strategis untuk “mengalami demokrasi” dan menjadi civilized adalah melalui “pendidikan kewargaan” didalam pendidikan kewargaan terkandung makna sosialisasi, diseminasi dan aktualisasi konsep, sistem, nilai, budaya, serta praktik demokrasi dan keadaban. “

Seperti yang dijelaskan,(Budimansyah, 2002:5) Bangsa Indonesia yang telah melakukan reformasi menuju kehidupan demokratis pada penghujung abad ke-20, harus berfikir bahwa semua institusi harus mendukung dapat mendukung untuk mewujudkan kehidupan yang

demokratis dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, lembaga pemerintah, maupun non pemerintah. Ada adagium yang menyatakan bahwa “Demokrasi dalam suatu negara akan tumbuh subur apabila dijaga oleh warga negara yang memiliki kehidupan demokratis”

Berdasarkan penjelasan di atas, pendidikan adalah sarana dan wahana untuk mengembangkan dan mengimplementasikan demokrasi baik di lingkungan formal maupun non formal untuk menghadapi era global dan terciptanya masyarakat madani maka sangat penting adanya penanaman nilai-nilai dan landasan fundamental tentang pengertian demokrasi dalam dunia pendidikan serta menjadikan kualitas sumber daya manusia dan peserta didik yang mampu menerapkan dan mengimplementasikan reformasi pendidikan seiring berkembangnya jaman agar tercipta kehidupan demokratis sesuai dengan instansi dan lembaga yang menaungi baik di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. menurut Kaelan, (1993:91-93) adalah:

“Negara itu sendiri secara umum diartikan sebagai suatu persekutuan hidup bersama sebagai penjelmaan sifat kodrati manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dengan demikian, negara memiliki sebab akibat langsung dengan manusia karena manusia adalah pendiri negara itu sendiri.”

Berdasarkan perspektif islam, hubungan antara agama dengan negara menjadi perdebatan yang cukup panjang diantara para pakar-pakar islam hingga kini. Berbagai eksperimen dilakukan dalam menyelaraskan antara din dengan konsep dan kultur politik masyarakat muslim, dan eksperimen tersebut dalam banyak hal sangat beragam. (Azra, 1996:1). Sama halnya dengan, salah satu isu yang paling populer sejak dasawarsa abad kedua puluh yang baru ini adalah isu demokratisasi. Sama seperti halnya syura dan demokrasi sama-sama muncul dari anggapan bahwa pertimbangan kolektif (*collective deliberation*) lebih mungkin melahirkan hasil yang adil dan masuk akal bagi kebaikan bersama daripada pilihan

individu. Pilihan kolektif lebih memungkinkan untuk mengantarkan kepada kebaikan bersama, “*syura*” dan demokrasi mengandung asumsi bahwa pertimbangan atau pendapat mayoritas cenderung lebih komprehensif dan akurat dibanding dengan penilaian minoritas. Kedua konsep ini lahir dari ide atau gagasan utama bahwa semua orang mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama. (Thaha, 2004:46)

Menurut (Abdillah,2015:74) selama orde baru, sejak (1966-1993) para tokoh islam dan intelektual juga mendukung demokrasi. Mereka mendukung demokrasi karena dua alasan:

1. Nilai-nilai demokrasi sesuai dengan nilai-nilai islam tentang masyarakat.
2. Demokrasi merupakan cara yang tepat untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan-kepentingan islam, karena umat islam Indonesia mayoritas, sementara sistem demokrasi pada dasarnya adalah sistem kekuasaan mayoritas.

Berdasarkan penjelasan diatas, demokrasi sangat erat kaitanya dengan islam dan ada kesamaan antara prinsip dan nilai-nilai demokrasi dengan islam. Seperti halnya *syura* dan demokrasi lahir karena konsep dan gagasan yang sama karena manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam mengartikulasikan dan mengaktualisasikan nilai-nilai islam dan demokrasi karena keduanya memiliki nilai-nilai yang sama. Penyelarasan antara sistem politik dan kultur budaya agama umat muslim yaitu dengan adanya rasa kebangsaan karena mayoritas Indonesia adalah umat islam begitu juga dengan demokrasi pada dasarnya sistem kekuasaan mayoritas yang akan mempersatukan keseragaman sistem politik dan kultur budaya politik agama umat muslim dan demokrasi.

Bangsa Indonesia yang mayoritas umat muslim sangat berpengaruh dalam perkembangan demokrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi islam yang nantinya akan terbentuk masyarakat madani yang mampu menciptakan demokrasi yang demokratis dan dapat diterima oleh warga negara baik di dalam lingkup lembaga pendidikan formal maupun non formal islam seperti di pondok pesantren ataupun lembaga non formal

islam yang sejalan agar mampu dan dapat mengimplementasikan nuansa demokrasi islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sama halnya dengan nilai-nilai demokrasi menurut Cipto, et al. (2002:31-37) meliputi:

1. Kebebasan menyatakan pendapat.
2. Kebebasan berkelompok.
3. Kebebasan berpartisipasi.
4. Kesetaraan antar warga.
5. Rasa percaya (Trust)
6. Kerjasama.

Berdasarkan wawancara awal kepada informan yaitu kepada ustadz Ali dan santriwati Lilik, bahwa implementasi pendidikan demokrasi di pondok pesantren darussalam adalah dalam pengembangan bidang pendidikan dan pengajaran, yaitu:

1. Bentuk-bentuk pendidikan dan pengajaran adalah:
 - a. Muhadzarah atau bahts al-kutub wa'al masa'il al diniyah, atau latihan muhadzarah (ceramah di depan umum)
 - b. Pendidikan jasmani, olahraga dan seni serta berbagai ketrampilan.
 - c. Pengajian umum harian, mingguan, bulanan, salapanan dan hari-hari besar.
2. Materi pendidikan dan pengajaran antara lain:
 - a. Praktek ibadah.
 - b. Metodologi dakwah.
 - c. Metodologi diskusi.
 - d. Berbagai ilmu pengetahuan.
 - e. Berbagai ketrampilan dan ketangkasan, antara lain:
 1. Seni bela diri.
 2. Seni hadroh.
 3. Jurnalistik.

4. Keterampilan komputer.

Implementasi pendidikan demokrasi di pondok pesantren zam-zam, adalah:

1. Partisipasi dalam bidang pendidikan dalam hal peningkatan kemampuan Baca Tulis Al-Quran (BTA) dan praktek ibadah.
2. Kebebasan dalam menempuh pendidikan mengaji.
3. Kerjasama melalui program presentasi bidang BTA dan Pelaksanaan Praktek Ibadah (PPI) dengan pondok pesantren yang ada di salah satu wilayah banyumas.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik mengambil judul “Implementasi Pendidikan Demokrasi di Pondok Pesantren”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pendidikan Demokrasi di Pondok Pesantren Darussalam dan Pondok Pesantren Zam-Zam?
2. Bagaimana tantangan dalam mengimplementasikan Pendidikan Demokrasi di Pondok Pesantren Darussalam dan Pondok Pesantren Zam-Zam?
3. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi tantangan mengimplementasikan Pendidikan Demokrasi di Pondok Pesantren Darussalam dan Pondok Pesantren Zam-Zam?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pendidikan Demokrasi di Pondok Pesantren Darussalam dan Pondok Pesantren Zam-Zam?
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tantangan mengimplementasikan Pendidikan Demokrasi di Pondok Pesantren Darussalam dan Pondok Pesantren Zam-Zam?
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi tantangan mengimplementasikan Pendidikan

Demokrasi di Pondok Pesantren Darussalam dan Pondok Pesantren Zam-Zam?

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Bagi Pondok Pesantren dapat memberikan pengetahuan tentang Implementasi Pendidikan Demokrasi di Pondok Pesantren.
 - b. Bagi penelitian selanjutnya dapat menjadi acuan sumber penelitian bagi penelitian selanjutnya.
 - c. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan tentang implementasi pendidikan demokrasi di pondok pesantren.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Santri, dapat memberikan pengetahuan tentang Implementasi Pendidikan Demokrasi di Pondok Pesantren.
 - b. Bagi Pondok Pesantren, dapat menanamkan dan melestarikan serta menyemaikan pengetahuan tentang kultur Implementasi Pendidikan Demokrasi di lingkungan Pondok Pesantren.
 - c. Bagi Kyai, memberikan dan mengimplementasikan contoh nilai-nilai Pendidikan Demokrasi di lingkungan Pondok Pesantren.